Pengelolaan Parsipatoris Sumberdaya Arkeologi di Maluku:
Sebuah Konsepsi Pengelolaan Berbasis Kearifan Lokal

G.M Sudarmika dan Wuri Handoko

I. PENDAHULUAN

Kepulauan Maluku, merupakan salah satu wilayah di Indonesia, yang kaya tinggalan budaya masa lampau (warisan budaya). Meskipun dalam pengembangannya masih tertinggal dengan daerah lain seperti Yogya dan Bali, Maluku memiliki potensi obyek wisata budaya yang tak kalah dengan daerah tersebut. Sumberdaya Arkeologi tersebar, menyedasi wilayah-wilayah Maluku, memiliki kekayaan corak dan karakter yang sangat potensial dikembangkan sebagai sebuah obyek wisata. Bahkan hasil survei Dinas Pariwisata Maluku Tahun 2005, telah membuktikan, ternyata wisata budaya menempati rasngking kedua terbanyak kunjungan turisnya setelah wisata alam dan bahari. Hanya saja, kondisi itu belum cukup menggambarkan bahwa potensi tersebut telah dikelola dengan optimal, juga belum secara konkret wisata budaya tersebut telah benar-benar mampu mengangkat harkat dan derajat masyarakat dari sisi ekonomi.

Hingga saat ini upaya pengembangan tersebut belum optimal, bahkan kesan yang muncul pengembangan tersebut belum terarah. Hal ini disebabkan oleh karena inisiatif pengembangan masih berkutat dari kemauan pemerintah saja atau dengan kata lain paradigma pembangunan yang masih *top down*. Pemerintah sebagai pointer utama, belum melirik peran dan keterlibatan penting masyarakat.

Dalam paradigma yang belakangan ini dikembangkan pemerintah sebagai fasilitator juga semestinya merangkul masyarakat untuk diarahkan sebagai fasilitator. Sebagai konsekuensinya, dalam kebijakan pelestarian yang baru, para aparatur negara atau pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan warisan budaya tidak lagi menjadi ‘abdi negara’ tetapi menjadi ‘abdi masyarakat’ (Tanudirjo, 2006).

Makalah ini dengan mengutip beberapa sumber kepustakaan ingin menegaskan sebuah kerangka konsep pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi. Perlu digarisbawahi, pengelolaan sumberdaya arkeologi telah diatur dalam sebuah sistem regulasi di Indoensia, baik UU perlindungan Benda Cagar Budaya maupun aturan lainnya. Dalam sistem regulasi tersebut, sesungguhnya peran masyarakat mndapat tempat, namun hingga saat ini dalam prakteknya keterlibatan masyarakat masih sebatas obyek belaka. Oleh karena itu dibutuhkan *political will* dan *good will*, dari pemerintah untuk sepenuhnya mengakui eksistensi masyarakat sebagai subyek pengelola sumberdaya arekolog.

II. Regulasi Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi

Saat ini Arkeologi semakin berkembang, baik dari segi konsep, teori, metode, maupun penerapannya. Yang tak kalah serunya semakin berkembang pula cara pandang ilmuan dalam menyikapi ilmu Arkeologi. Sebagian Ilmuwan banyak memandang arkelogi merupakan ilmu yang khususnya untuk mempelajari masa lampau, sehingga, obyek kajiannya harus tetap lestari, apa adanya dan tak diganggu gugat oleh aktivitas tangan manusia. Kelompok ini memandang pelestarian arkeologi ditujukan semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan untuk mempelajari sejarah dan proses perkembangan budaya masa lampau. Kelompok yang memandang demikian, bisa dikategorikan sebagai penganut *arkeologi konservasionis (konservatif)*. Sementara arkeologi sebagai sebuah sumberdaya yang justru dilestarikan untuk kemanfaatan jangka panjang bagi masyarakat, bisa dikategorikan sebagai *arkeologi populis*. Kedua penyebutan ini bisa jadi menjadi sebuah jargon baru, meski pada dasarnya kedua hal ini telah lama berkembang dalam perdebatan-perdebatan formal sepanjang berkembangnya ilmu arkeologi. Penyebutan kedua istilah ini juga tidak bermaksud untuk mendikotomikan kedua ranah garapan arkeologi ini.

Perkembangan baru terjadi dalam dunia arkeologi bersamaan dengan menguat-nya kesadaran akan kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang memicu gerakan konservasionis (*green movement* atau *conservation movement*) pada tahun 1970-an. Tentang pelestarian lingkungan muncul dua paradigma, yakni sebagian memandang pelestarian lingkungan

dimaksudkan untuk menjaga keutuhan sumberdaya alam dan lingkungan (*konservasi total*) dan pelestarian lingkungan untuk kebutuhan hajat orang banyak (*konservasi populis*).

Hampir sama dengan hal itu, di bidang Arkeologi mulai muncul kesadaran akan terancamnya sumberdaya arkeologi, sebagai mana sumberdaya alam. Makin disadari bahwa sumberdaya arkeologi bersifat tidak diperbaharui (*non-renewable*), terbatas (*finite*), tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula (*irreversible*) dan khas (*contextual*), sehingga amat rentan terhadap kegiatan pembangunan dan pengubahan lahan. Pada awalnya kesadaran ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang sering disebut Arkeologi Kontrak (*Contract Archaeology*). Dalam kegiatan itu, para praktisi arkeologi dikontrak oleh pemerintah atau swasta yang harus melakukan studi kelayakan bidang arkeologi ketika akan memulai proyeknya. Hal ini diperlukan karena ketentuan hukum menuntut agar setiap kegiatan pemerintah atau swasta yang mengubah lahan atau berpotensi membawa dampak pada sumberdaya arkeologi melakukan pendugaan dampak (McGimsey dan Davis, 1977 dalam Tanudijo, 2004).

Dalam sejarah pengeloan sumberdaya arkeologi di Indonesia, sejak masa pendudukan Belanda, hingga masa kemerdekaan pengelolaan sumberdaya arkeologi masih berpusat di tangan pemerintah, sementara peran masyarakat masih terpinggirkan. Masa Pra kemerdekaan upaya pengeloan sumberdaya arkeologi oleh pemerintah Belanda ditujukan untuk menjamin akses ke warisan budaya Indonesia. Sementara masa setelah kemerdekaan arah pengelolaan menekankan pada beberapa hal antara lain :

- Secara bertahap pengelolaan diserahkan ke bangsa Indonesia
- MO 1931 masih menjadi dasar hukum
- 1992 UU No. 5 tentang BCB diberlakukan
- Baik pengelola maupun peneliti warisan budaya adalah Pegawai Negeri. Dengan demikian sangat berpihak pada kepentingan pemerintah
- Peran pemerintah sangat dominan dalam pengambilan keputusan, hak partisipatif masyarakat luas belum terwadahi, hal ini memunculkan

adanya potensi konflik (Lihat Tanudirjo, 2004 dan 2005). Demikian, dapat disimpulkan upaya pengelolaan sumberdaya arkeologi sejauh ini masih berkuat pada paradigma lama, yakni semua berpusat dan didominasi oleh pemerintah (negara), sementara hak-hak masyarakat sebagai pemegang hak historis dan budayanya masih terpinggirkan.

Tampaknya meskipun dewasa ini paradigma dan regulasi pengelolaan sumberdaya arkeologi ini mulai berubah ke arah yang lebih berpihak pada masyarakat namun di tingkat pelaksanaannya belum banyak beranjak. Upaya penyelamatan warisan budaya arkeologis dilakukan melalui perlindungan situs dan arkeologi penyelamatan (salvage archaeology). Kegiatan itu umumnya dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan hukum yang berlaku (Renfrew dan Bahn, 1991). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, dengan tegas disebutkan bahwa pengelolaan Benda Cagar Budaya (BCB) dan situs adalah tanggungjawab pemerintah, masyarakat, kelompok atau perorangan. Jadi dengan kata lain bahwa yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan Benda Cagar Budaya tersebut adalah semua lapisan masyarakat.

Pengelolaan Benda Cagar Budaya yang di dalamnya termasuk sumberdaya arkeologi yang akan dibicarakan dalam tulisan ini adalah bagaimana mengelola sumberdaya arkeologi untuk dapat menciptakan suatu kondisi yang kondusif dalam upaya mengantisipasi secara preventif sehubungan dengan adanya pemanfaatan sumberdaya arkeologi baik dalam upaya pengembangannya maupun digunakan untuk kepentingan lain sesuai dengan perkembangan pembangunan disegala bidang terutama pada proyek-proyek pembangunan yang berskala besar, sehingga diharapkan pengelolaan sumberdaya arkeologi tersebut dapat saling menguntungkan di semua sektor pembangunan. Untuk menghindari konflik kepentingan maupun tuntutan kepada pemrakarsa proyek dikemudian hari, sehingga patutlah disampaikan informasi tentang potensi arkeologis di area pembangunan dan sekitarnya.

Dengan demikian pemrakarsa pembangunan memperoleh pemahaman yang luas dan mendalam tentang berbagai aspek lingkungan yang terkait, guna memberi bahan pertimbangan di dalam menetapkan pilihan kegiatan sehubungan dengan proyek yang direncanakan (Bugie, 1988:2). Pertimbangan arkeologis dalam pengambilan keputusan suatu

pembangunan merupakan komponen utama dari subdisiplin Pengelolaan Sumberdaya Budaya (PSB). Subdisiplin tersebut merupakan bagian dari disiplin arkeologi yang mendasarkan pemikirannya pada upaya pelestarian dan informasi tentang masa lampau manusia.

Di negara maju seperti di Amerika, pertimbangan arkeologi bagi proyek-proyek pembangunan dijamin oleh berbagai peraturan. Puncak dari semua itu adalah National Environmental Policy Act (NEPA) yang mengatur secara komprehensif dan koheren dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah tentang tata guna lahan dalam hubungannya dengan pengelolaan sumberdaya budaya (Schiffer and Gumerman, 1977 : 5-6, Bugie, 1988 : 4). Kelebihan NEPA adalah pada ditetapkannya pendugaan/analisis dampak lingkungan sebagai syarat setiap prakarsa proyek pembangunan. Dengan adanya aturan ini maka pemrakarsa proyek wajib melakukan pendugaan atau analisis dampak yang akan diakibatkan oleh proyek tersebut atas lingkungan hidup di sekitarnya. Dalam pemikiran ini, tinggalan arkeologis sebagai unsur utama sumberdaya budaya merupakan komponen yang patut dipertimbangkan bersama dengan komponen yang lain yaitu sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 14 dan penjelasannya) digariskan secara implisit. Secara eksplisit ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) bagi tinggalan arkeologis (Benda Cagar Budaya) digariskan secara tegas dalam PP No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (pasal 2 (1) e, dan penjelasannya). Ketentuan semacam ini tidak saja berlaku bagi pelaksanaan Amdal saja tetapi juga dalam pelaksanaan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (Semdal).

Bagi perencanaan suatu kegiatan pembangunan, Amdal merupakan salah satu komponen dari kegiatan studi kelayakan (*feasibility study*), di luar komponen yang lain yaitu aspek teknis dan ekonomis (PP No. 29 Thn. 1982 pasal 6). Melalui Amdal direncanakan pendugaan dampak negatif suatu proyek pembangunan dapat disiapkan mitigasinya, serta di lain pihak dapat disiapkan rencana pengembangan dampak positif yang diperkirakan akan timbul. Bagi sumberdaya arkeologi Amdal disusun dengan tujuan untuk (1) mengidentifikasi rencana kegiatan terutama yang menimbulkan dampak penting bagi sumberdaya arkeologi,

(2) mengidentifikasi rona lingkungan terutama yang akan terkena dampak, (3) memperkirakan dan menganalisis (mengevaluasi) dampak penting (significance), dan (4) memberikan saran dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap sumberdaya arkeologi di lokasi proyek dan sekitarnya. Pertimbangan sumberdaya budaya dan keterlibatan kalangan arkeologi dalam Amdal menuntut konsekuensi adanya ahli arkeologi di dalam Komisi Penilai. Dimana keanggotaan Komisi Penilai diatur dalam Keputusan Menteri Negara KLH No. Kep-53/MENKLH/6/1987. Dalam hal ini keterlibatan arkeologi dapat dimasukkan sebagai : (1) pakar/ahli yang mengetahui tentang dampak kegiatan tersebut, atau (2) wakil dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Untuk butir (1) jelas bukan pakar arkeologi dari instansi penelitian atau instansi perlindungan dan pembinaan yang dilibatkan, hal ini menyangkut obyektifitas dalam penilaiannya. Dalam hal ini harus melibatkan para pakar dari kalangan perguruan tinggi (staf edukatif). Sedangkan untuk butir (2) harus melibatkan organisasi profesi arkeologi sesuai dengan penjelasan pasal 19 UU No. 4 Thn. 1982 yang mengategorikan organisasi profesi sebagai bagian dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam hal ini organisasi profesi yang dimaksud adalah Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI).

Dengan adanya ketentuan semacam tersebut pelestarian sumber budaya menemukan identitasnya. Pemikiran tersebut lebih bersifat komprehensif dengan memberikan prioritas yang tinggi bagi tinggalan arkeologis tidak saja sekedar untuk melokalisasi situs maupun memetik data semata, tetapi juga mengembangkan metode dan kebijakan yang akan melestarikan sumberdaya arkeologi bagi generasi mendatang. Ketentuan-ketentuan semacam tersebut bukan saja dapat memberikan jaminan bagi kelestarian sumberdaya arkeologis, tapi juga dapat mengikuti aturan permainan dari strategi dan proses pembangunan nasional, yaitu adanya keterkaitan antara proses pengambilan keputusan antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan yang berwawasan pelestarian Benda Cagar Budaya.

Selain beberapa pandangan di atas dalam upaya pengelolaan sumberdaya arkeologi, juga harus memperhatikan sistem koordinasi terpadu terutama dengan masyarakat, pemerintah daerah, mulai dari tingkat wilayah sampai ke desa-desa. Disini disampaikan peran dan fungsi dari pelestarian sumberdaya arkeologi kepada masyarakat dengan tepat. Dalam hal

ini pertimbangan sosial kemasyarakatan kelihatannya sangat membantu pemerintah daerah, dan masyarakat harus merasa ikut bertanggungjawab atas tinggalan budaya material yang ada di wilayahnya.

Dengan demikian upaya lebih difokuskan kepada pemahaman tentang aspek nilai, terutama aspek kemasyarakatan dan aspek ekonomis. Pola ini diharapkan untuk mengarahkan pandangan masyarakat terhadap pembangunan kebudayaan secara umum termasuk pelestarian Benda Cagar Budaya, yang pada gilirannya akan mengarah pada pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang aspek nilai penting lainnya, seperti kemanfaatan dalam pemupukan ideologi bangsa dan penggalakan nilai edukatif (Natsir, 1988 : 14). Hal yang penting dalam sistem regulasi ke depan untuk informasi pentingnya pelestarian sumberdaya arkeologi dapat dilakukan melalui berbagai pendidikan masyarakat baik formal maupun informal, baik secara individu maupun melalui wadah kelembagaan.

III. Pengelolaan Parsipatoris Sumberdaya Arkeologi

Kepulauan Maluku, kaya sumberdaya arkeologi yang potensial untuk dikembangkan. Maluku banyak memiliki sumberdaya arkeologi (warisan Budaya) hampir di setiap wilayah. Meski demikian sumberdaya tersebut belum dikelola optimal. Kelemahan lain yakni masyarakat belum mendapat tempat yang optimal sebagai salah satu subyek pengelola (stakeholders), padahal dukungan publik sangat penting bagi berkembangnya sebuah sumberdaya arkeologi bagi pembangunan. Masalah lain yang bisa didaftar adalah koordinasi antar instansi masih lemah,. Hal ini semakin mempertegas konflik kepentingan yang belum terselesaikan, akibatnya justru banyak sumberdaya arkeologi terancam keberadaannya.

Manajemen sumberdaya arkeologi pada dasarnya ditekankan pada kepentingan semua pihak, tak luput yang terpenting adalah untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat sebagai subyek pengelolola sangat penting. Hal ini ditekankan untuk memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam disiplin ilmu arkeologi, mengenal model pengelolaan sumberdaya budaya dan atau sumberdaya arkeologi yang disebut Cultural Resource Management (CRM) atau Manajemen Sumberdaya Budaya (MSB) yang kemudian

dipersamakan dengan Manajemen Sumberdaya Arkeologi (MSA) karena kajian dan perhatian utamanya pada tiinggalan arkeologi (Tanudirjo, 2004: 2). Munculnya paradigma ini mengingat kesadaran bahwa sumberdaya arkeologi merupakan sumberdaya bersifat :

- * non-renewable (tak terbaharui)
- * irreversible (tak dapat diubah)
- * finite (*terbatas*),
- * Fragile (rapuh) oleh karena itu patut dilestarikan (Atomosudiro 2006, Tanudirjo, 2004 dan 2006)

Pada prinsipnya manajemen sumberdaya arkeologi, menekankan pada penyelamatan sumberdaya arkeologi untuk berbagai kepentingan antara lain jati diri (*cultural identity*) yang dikaitkan dengan fungsi pendidikan, manfaat ekonomis lewat kepariwisataan, dan fungsi akademis untuk menjaga dan menyelamatkan basis data tentang sumberdaya tersebut. (Cleere, 1990). Sementara Schiffer and Gumerman (1977) menekankan pada substansi pengelolaan tujuan jangka panjang yang diarahkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi ilmu pengetahuan, sejarah dan masyarakat.

Penjelasan para ahli bidang pengelolaan sumberdaya arkeologi tersebut memfokuskan perhatiannya atas pentingnya sumberdaya arkeologi bagi kepentingan masyarakat. Prakteknya, sumberdaya tersebut perlu dikembangkan selain untuk pendidikan juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata. Pemanfaatan melalui pariwisata merupakan pilihan model pelestarian yang tepat. Karena pariwisata merupakan model pemanfaatan dan pelestariann yang pada hakekatnya untuk kepentingan masyarakat Dalam memposisikan masyarakat sebagai subyek penting menjadi pihak pengelola, maka pertanyaan yang penting yang mesti dijawab mengapa Masyarakat Harus Terlibat? Apa Potensi masyarakat? Jawaban pertanyaan tersebut adalah antara lain :

- Masyarakat merupakan pewaris sehingga merekalah sesungguhnya pemegang hak atas historis dan kulturenya
- Masyarakat bersentuhan langsung dengan sumberdaya arkeologi, karena sebagian besar sumberdaya arkeologi, justru berada ditengah masyarakat
- Di Indonesia, terutama di Maluku, masih banyak masyarakat yang

mempertahankan ciri lokal, sehingga kebudayaan dan tradisi masa lampau masih hidup dan dipertahankan, dengan demikian mereka masih menjadi pelaku bagian budaya masa lampau yang masih hidup (*living culture*).

- Masyarakat memiliki pengetahuan berdasarkan pengalaman historis dan kulturenya

Berdasarkan hal itu maka pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan Sumberdaya Arkeologi (SDA), sekaligus juga menggali berbagai bentuk kearifan lokal yang masih hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Mundarjito (2006) mengatakan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya harus dikelola secara integratif dan partisipatif antar stakeholder (2006 :1). dengan demikian, justru dengan pendekatan partisipatoris dan integratif, maka kearifan lokal dapat digali dan diterapkan dalam praktek pengelolaan SDA.

Keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan SDA dapat dilakukan dalam bentuk :

- Perencanaan
- Penelitian arkeologi dan identifikasi nilai penting
- Pelestarian
- Pemanfaatan
- Evaluasi dan monitoring

Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA dimulai dari tahap perencanaan hingga pemanfaatannya juga dalam pengawasan (bersifat *Bottom up*). Dalam penelitian dan pendugaan nilai penting sumberdaya arkeologi, dengan pelibatan secara inklusif, masyarakat juga mampu mengevaluasi pengetahuannya. Maka perbedaan pengetahuan atas sejarah dan kebudayaan antar kelompok masyarakat selain dapat terwadahi juga dapat saling dipertemukan.

Prinsip kehati-hatian yang diwujudkan melalui keberpihakan kepada masyarakat sesungguhnya telah digagas dan dirancang oleh para arkeolog baik itu arkeolog luar maupun arkeolog Indonesia. Konsepsi Arkeolog Publik yang dipersamakan dengan Cultural Resouch Management (CRM) menyangkut pengelolaan sumberdaya Arkeologi, sesungguhnya sebuah konsepsi pelibatan secara aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi.

Namun patut disayangkan bentuk keberpihakan arkeologi terhadap masyarakat sejauh ini masih terbatas konsepsi dan wacana, sementara pelaksanaannya belum nyata dijalankan. Tak dapat disangkal, ini belum beranjak pada praktek yang elitis. Hal ini karena bentuk perencanaan dan pengelolaannya masih bersifat *top down*, yakni diinisiasi oleh institusi penelitian dan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan mengelola sumberdaya arkeologi. Hal ini karena tidak melibatkan masyarakat sejak awal, tahap perencanaan hingga pemanfaatan sumberdaya arkeologi. Prinsip keberpihakan terhadap masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perlu dimulai sejak awal, hal ini karena sejak awal penelitian arkeologi tak bisa dipisahkan dan selalu bersentuhan dengan masyarakat atau komunitas yang bermukim di sekitar wilayah penelitian arkeologi di lingkup terkecil seperti desa atau dusun. Oleh karena itu penting diterapkan pendekatan pengelolaan yang melibatkan partisipasi komunitas dalam penelitian arkeologi, sehingga pengelolaan Sumberdaya arkeologi bersifat partisipatoris dan inklusif — tidak eksklusif— seperti praktek pengelolaan selama ini (Handoko, 2006).

Sinergi dalam CRM (dikutip dari Tanudirjo, 2006)

Hakekat pelestarian adalah untuk kepentingan masyarakat (Tanudirjo, 2006). Menurut Macleod (1977), pengelolaan sumberdaya arkeologi idealnya melibatkan tiga pihak yang berkepentingan, yaitu masyarakat, academia, dan pemerintah yang masing-masing memiliki peranan dan kedaulatan yang berbeda. Hingga saat ini, konsep pengelolaan warisan budaya masih bersifat perlindungan situs (Mundardjito, 1996) yang dilihatnya sebagai entitas bendawi yang mati bukan sebagai *social construct* yang menempatkan warisan budaya pada konteks sosial sekarang.

Beberapa prinsip dasar pengelolaan Sumberdaya arkeologi dapat disimpulkan yakni antara lain :

- kita harus melestarikan sumberdaya budaya jika kita ingin mengambil manfaat darinya,
- kita harus mempelajarinya jika ingin memahami manfaat yang kita peroleh,
- kita harus menerjemahkan pengetahuan yang kita peroleh untuk masyarakat.
- jadi, dari masyarakat-lah proses ini berawal dan kepada mereka-lah semua itu harus diserahkan (Dicken and Hill dalam Mayer-Oakes, 1990, dalam Tanudirjo, 2006)

Berdasarkan prinsip dasar tersebut, kiranya dapat ditawarkan beberapa rambu-rambu dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi yang melibatkan partisipasi masyarakat yakni :

- Tetap mempertahankan otentisitas sumberdaya Arkeologi, justru dengan ini kearifan lokal tetap hidup. Kehidupan tradisional dapat digali, dikaji dan dipertahankan melalui partisipasi aktif dan langsung masyarakat sebagai pewaris pengetahuan tentang kehidupan masa lalu leluhurnya. Hal ini menjadi falsafah yang dapat digali dan dianut dalam kehidupan saat ini.
- Tetap mengacu ke UU tentang perlindungan Warisan Budaya (Benda Cagar budaya) dan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) serta peraturan pemerintah lainnya yang mengikat.
- Selalu dimulai dengan perencanaan yang melibatkan masyarakat, misalnya dalam bentuk konsultasi publik, karena dengan model ini berbagai pengetahuan masyarakat dapat digali. Selain

itu dapat mewadahi pula berbagai sudut pandang masyarakat.

- Mitigasi, melakukan pencegahan terhadap kerusakan SDA berdasarkan pada etika dan moral. (Tanudirjo, 2006).
- Evaluasi dan Monitoring terkoordinatif oleh para pihak, termasuk masyarakat.

Meski partisipasi rakyat menjadi hal yang terdepan, namun harus tetap memperhatikan regulasi, kebijakan, etika dan moral subyek pengelola. Banyak kasus overlapping atau penyalahgunaan konsep, pemutarbalikan paradigma, dan pembenaran atas nama masyarakat untuk kepentingan bisnis sekelompok orang saja, sehingga etika, moral tetap harus dibungkus oleh tegaknya UU dan wibawa penegak hukum.

Penutup

Hal yang justru paling penting harus dilakukan terlebih dahulu adalah penumbuhan kesadaran di kalangan arkeologi bahwa sudah menjadi “kewajiban” bagi kalangan arkeologi untuk menaruh kepedulian terhadap masyarakat lokal di sekitar situs arkeologi. Keberdayaan kelompok masyarakat di sekitar situs arkeologis secara sosial-budaya, politik, dan ekonomi justru menjadi pondasi yang kokoh bagi upaya perlindungan dan pelestarian tinggalan arkeologis di kawasan itu (Prasodjo, 2004).

Sumberdaya arkeologi apapun alasannya harus diselamatkan demi pembangunan itu sendiri. Adanya berbagai kepentingan di seputar sumberdaya arkeologi termasuk kepentingan ekonomi dengan mengelola sumberdaya alamnya, hendaknya tetap berpedoman pada Undang-Undang RI No. 24 tahun 1992 pasal 2 dan 3, antara lain dikemukakan bahwa penataan ruang berazaskan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan. Penataan ruang bertujuan terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Keharusan adanya koordinasi dan keterpaduan antara pelaksanaan pembangunan dibidang ekonomi dengan pelestarian situs lebih ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1993, tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 5 tahun 1992 pasal 44 intinya

menyebutkan bahwa setiap rencana kegiatan pembangunan di seputar situs, perlu adanya studi arkeologis terlebih dahulu, yaitu dengan memadukan beberapa program kegiatan yang ada titik singgungnya dan selalu mengadakan monitoring demi tercapainya sasaran, maksud serta tujuan. Kerjasama ini amat penting mengingat sumberdaya arkeologi mempunyai fungsi untuk pendidikan kultural, pemupukan kepribadian bangsa, ketahanan nasional, pembinaan, pengembangan nilai-nilai budaya, serta ilmu pengetahuan.

Apabila pengelolaan sumberdaya arkeologi dapat dilaksanakan secara konsekuen dengan mengacu kepada semua Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Benda Cagar Budaya serta keterlibatan penuh masyarakat pastilah kelestarian dan kesinambungan dari sumberdaya arkeologi tersebut akan terjamin sepenuhnya.

Daftar Pustaka

Handoko, Wuri 2006 *Arkeologi Komunitas: Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Penelitian Arkeologi di Indonesia. Sebuah Pendekatan untuk Wilayah Penelitian di Maluku*. Makalah untuk **Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi (EHPA)**. Cikutra. Bandung.

..... 2007 *Sumberdaya Arkeologi Menuju Industri Pariwisata di Maluku Masalah Peluang, Tantangan dan Solusinya*. **Kapata Arkeologi**. Edisi Khusus Balai Arkeologi Ambon.

Kusumohartono Bugie, 1993 *Penelitian Arkeologi Dalam Konteks Pengembangan Sumberdaya Arkeologi*. **Lokakarya Intern Tentang Penelitian, Amdal dan Pelestarian Sumberdaya Arkeologi**, Balai Arkeologi Yogyakarta

....., 1988 *Pengelolaan Sumberdaya Budaya dalam Perspektif Pelestarian Arkeologi dan Tata Laksana PP No. 29 Tentang AMDAL*. Yogyakarta

Mundarjito, 1996 *Pendekatan Integratif dan Partisipatif Dalam Pelestarian Budaya*. **Jurnal Arkeologi Indonesia II**. Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia.

....., 2006 *Strategi Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Candi Borobudur: Pendekatan Integratif dan Partisipatif*. Badan pengembangan Sumberdaya Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta.

Tanudirjo, Daud Aris, 2004 *Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi : Sebuah Pengantar*. Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya UGM. Yogyakarta. Bahan Diskusi untuk Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi di Trowulan.

....., 2006 *Pengantar Pengelolaan Sumberdaya Budaya*. Jurusan Arkeologi. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. Bahan Diskusi untuk Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Budaya di Yogyakarta.

Tjandrasasmita, 1983 Hasil Pemugaran Peninggalan Sejarah dan Purbakala sebagai objek Wisata Budaya Kamandalu. Jakarta

Tim Balar Ambon, 2006 **Laporan Kegiatan Diskusi dan Pameran Arkeologi 2006**. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Balai Arkeologi Ambon.